

Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial*

Oleh

Prof. Syafruddin Karimi, SE, MA, Ph.D**

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Sasaran sebuah kebijakan ekonomi meliputi stabilitas pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas harga, dan menurunkan kesenjangan ekonomi (Stigler, 1952). Sasaran ini juga sejalan dengan makna sebuah pembangunan yang mesti mengandung pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penurunan kesenjangan ekonomi dan pengurangan penduduk miskin (Seers, 1977). Sementara pemerintah orde baru menganut strategi yang dikenal dengan trilogi pembangunan: pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) di masa pemerintahan reformasi selama 2000-2004. meresmikan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia. Pemerintahan hasil demokrasi langsung ke luar dengan konsep pro-poor, pro-job dan pro-growth di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Kemudian dipertegas lagi dalam RPJM 2009-2014. dengan konsep growth with equity (Bappenas, 2010).

Pemerataan selalu mendapat posisi sebagai dampak pertumbuhan ekonomi. Tidak pernah muncul sebagai sebuah target yang ingin dicapai buat memperbaiki sebuah keadaan distribusi pendapatan seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit dan lain-lain yang selalu diberi angka target. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak jarang menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tinggi pula. Kesenjangan ekonomi yang tinggi mengganggu stabilitas, baik ekonomi maupun politik. Gangguan terhadap stabilitas menyebabkan terjadinya krisis (Minsky, 1986).

Krisis, stabilitas, dan kesenjangan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Krisis ekonomi yang pernah sangat parah menggoncang Indonesia sebenarnya sangat dekat dengan kesenjangan ekonomi yang telah berakumulasi lama dan kita cenderung melihatnya bukan sebagai persoalan besar. Bahkan kita cenderung ber retorika bahwa keadilan ekonomi kita berjalan baik. Kemiskinan kita bahkan terus turun. Lalu apakah stabilitas ekonomi kita aman?

Kalau kita baca pembukaan UUD 1945, kita akan jumpai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap upacara peringatan kemerdekaan Indonesia, kita membaca keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan suara lantang. Lalu apakah kita mengalami kemajuan dengan kinerja bangsa kita dalam implementasi keadilan sosial? Sebagai seorang ekonom saya risau dengan keadilan sosial. Lebih

* Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 9 Oktober 2010.

** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2008-2012.

risau lagi bila saya sandingkan dengan sistem pasar yang telah memasuki hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu kita perlu menyatakan demokrasi ekonomi sebagai sebuah manifesto. Dengan keterbukaan perekonomian seperti sekarang dan liberalisasi perdagangan di mana bangsa kita ikut ambil bagian, kiranya kita perlu secara tegas menyatakan manifesto demokrasi ekonomi. Ini adalah respon demokratis terhadap sistem pasar yang menjadi norma perekonomian global dan keadilan sosial yang menjadi janji kemerdekaan bangsa kita.

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Bila kita lihat kondisi ekonomi kita sekarang yang telah mencapai usia 65 tahun merdeka, lalu kita bandingkan dengan kondisi ekonomi kita pada awal awal kemerdekaan, kita perlu pula bersyukur bahwa banyak kemajuan yang telah kita capai. Namun kalau kita bandingkan dengan bangsa lain, kita akan menanyakan mengapa mereka bisa lebih cepat maju dibanding kita. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, apalagi Singapura, kiranya tidak relevan. Kedua negara ini sebenarnya negara kecil, karena penduduknya kecil dan luas wilayahnya jauh lebih kecil lagi dibanding luas tanah air kita. Jadi kita tidak begitu terganggu kalau pendapatan per kapita Malaysia ataupun Singapura lebih besar dibanding kita.

Tetapi bila kita bandingkan kemajuan bangsa kita dengan Cina atau India, kita akan merasa tidak aman. Dibanding kedua negara ini, kita lebih duluan menjadi bagian dari keterbukaan ekonomi global. Ketika India masih menganut strategi *inward-looking* dalam pembangunan industri mereka, kita sudah melaksanakan deregulasi ekonomi dan orientasi ekspor. Apalagi bila kita bandingkan dengan Cina. Ketika Cina masih melakukan Revolusi Budaya, kita sudah memulai pembangunan ekonomi berencana dan berintegrasi dengan perekonomian internasional. Kalau kita sebut sumberdaya alam, kita tidak pernah merasa di belakang India ataupun Cina. Awalnya, kita merasa kalah dibanding India dan Cina dalam jumlah penduduk. India berpenduduk mendekati 1 milyar jiwa, sedangkan Cina sudah jauh melampaui 1 milyar. Penduduk kita pada tahun 2010 masih belum mencapai 250 juta jiwa.

Tabel 1. Penanaman Modal Langsung di Beberapa Negara Asia

Negara	FDI/GDP (%)					
	2000		2003		2006	
	Flow	Stok	Flow	Stok	Flow	Stok
China	3,41	16,21	3,25	13,86	2,6	10,97
India	0,76	3,74	0,73	5,2	1,87	5,61
ASEAN	3,95	44,2	3,42	42,41	4,85	39,56
Indonesia	-2,76	15,02	-0,25	4,4	1,52	5,23
Malaysia	4,19	58,4	2,38	39,62	4,07	35,97
	2,99	17,07	0,62	14,81	2,01	14,64
Philippines						
Singapore	17,78	121,48	12,63	160,22	18,32	158,97
Thailand	2,73	24,38	3,67	34,31	4,73	33
Viet Nam	4,14	66,07	3,67	69,54	3,99	57,69
Sumber: WIR						

Kini kita berada di belakang Cina dan India bukan hanya dalam jumlah penduduk. Mereka mengalami kemajuan ekonomi yang jauh lebih pesat dibanding yang kita bayangkan. Pertumbuhan ekonomi India dan Cina lebih cepat dibanding kita. Pendapatan per kapita Cina dengan penduduk lebih dari 1 milyar jauh lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita bangsa kita. Kita baru saja mengikat kerjasama perdagangan bebas dengan Cina bersama negara-negara ASEAN. Mestinya kita merasa lebih mendapat kesempatan buat perluasan pasar bagi produk yang kita hasilkan, tetapi yang kita rasakan justru kebalikannya. Perdagangan bebas ASEAN-Cina kita lihat sebagai ancaman yang akan mengambil peluang pasar domestik kita. Tentu ada yang salah dengan mentalitas ekonomi bangsa kita.

Kita harus berupaya keras mengejar ketinggalan kita dari Cina. Banyak hal perlu kita kejar. Pertama tingkat kesejahteraan rata-rata yang tercermin di dalam pendapatan per kapita kita yang lebih rendah. Artinya pertumbuhan ekonomi kita mesti lebih cepat. Kalau mau mengejar Cina, kita perlu memasukkan modal asing lebih banyak. Dalam soal ini kita masih ketinggalan jauh di belakang Cina. Rasio PMA kita terhadap PDB kita masih sangat rendah. Dalam hal ini kita akan berhadapan dengan sistem pasar global yang kapitalistik. Cina yang sosialis. Kini Cina masih mengaku sosialis. Cina yang sosialis mampu menarik PMA dari kapitalisme global yang lebih besar dibanding kita. Mengapa kita tidak mampu? Dalam hal mengendalikan kapitalisme tampaknya kita perlu belajar ke Cina yang masih mengaku sosialis.

Tabel 2. Kinerja Ekonomi di Beberapa Negara Asia.

Negara	Penduduk (%/tahun)	Pertumbuhan Ekonomi (%/tahun)			GDP/Kapita (US\$)		Export/GDP(%)	
	1960-08	1990-98	1999-08	2000	2008	2000	2008	
China	1,4	10,3	9,8	949	3.267	23,33	36,55	
India	2,0	5,4	7,1	453	1.017	13,23	22,67	
Indonesia	1,9	5,3	4,7	804	2.246	40,98	29,76	
Malaysia	2,5	7,4	5,6	4.030	8.209	119,81	110,17	
Philippines	2,5	2,7	4,8	977	1.847	55,40	36,86	
Singapore	2,3	7,6	5,7	23.019	37.597	191,42	234,34	
Thailand	1,9	5,4	4,7	1.968	4.043	66,78	76,63	
Vietnam	1,9	7,7	7,2	402	1.051	55,03	78,21	

Sumber: Diolah dari WDI.

Dalam integrasi dengan perdagangan dunia kita masih di belakang banyak negara Asia, kecuali India. Ini terbukti dari rasio ekspor kita dibanding PDB. Seperti halnya negara-negara ASEAN yang mengalami penurunan rasio ekspor, kita mengalami penurunan rasio ekspor yang cukup besar. Sementara Cina dan India mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan daya saing barang-barang kita di pasar global yang lebih rendah dibanding mereka.

Sistem keuangan yang baik sering disebut sebagai pemicu pembangunan ekonomi (Levine, 1997). Biasanya yang dijadikan indikator adalah rasio kredit yang disalurkan ke sektor usaha terhadap produk domestik bruto. Bila kita bandingkan kembali laju pertumbuhan ekonomi kita dengan beberapa negara Asia, terutama Cina dan India, lalu kita kaitkan dengan kinerja kredit, maka kita akan mengatakan pantas saja laju pertumbuhan ekonomi lamban. Rasio kredit terhadap PDB kita terbukti paling rendah. Artinya sektor perbankan kita paling pelit menyalurkan kredit bila kita

banding dengan Cina dan India. Kalau kita banding dengan Malaysia, kita lebih parah lagi (lihat Tabel 2).

Kita juga sering mendengar, kredit sulit disalurkan karena tingginya resiko akibat tingginya kredit macet. Kalau soal kredit macet bukan hanya kita. Cina mengalami kredit macet paling tinggi di antara beberapa negara Asia. Kita masih di bawah Cina.

Masih dalam soal kredit yang sering dikeluhkan adalah pelaku ekonomi kita adalah bunga pinjaman yang tinggi. Terbukti bunga pinjaman kita memang paling tinggi di antara beberapa negara Asia. Suku bunga pinjaman di Cina masih di bawah 6% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman di Indonesia di atas 16%. Lalu bagaimana caranya kita mendorong pengusaha ekspor kita meningkatkan daya saing? Kalau begini situasinya pantas kita kalah mental dengan Cina dalam kerjasama perdagangan bebas. Jalan keluarnya adalah membenahi peran negara dalam menghadapi sistem pasar. Negara perlu lebih agresif memperkuat daya saing pelaku ekonomi kita, tidak hanya dalam menghadapi persaingan impor, tetapi juga buat merebut pasar yang lebih luas dalam kerjasama perdagangan bebas yang kita ikuti.

Tabel 3. Kredit dan Investasi di Beberapa Negara Asia						
Rata-rata Kinerja Kredit Perbankan, 2000-2008						
	Kredit/GDP	Bunga Pinjaman	Kredit Macet	Investasi/GDP	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Negara	(%)	(%/tahun)	(% Total Kredit)	(%)	(%)	
China	134,26	5,82	15,12	41,1	10,26	9,99
India	60,27	11,88	7,1	31,3	5,43	7,09
Indonesia	47,95	16,06	13,62	24,3	5,28	5,16
Malaysia	151,96	6,51	11,57	23,1	7,37	5,49
Philippines	56,88	9,93	15,2	16,8	2,71	4,97
Singapore	82,08	5,42	4,48	23,7	7,59	5,49
Thailand	126,67	6,74	11,27	26,4	5,37	4,76
Vietnam	63,46	10,82		35,7	7,71	7,47
Sumber: WDI						

Bagaimanapun, perlu pula kita ingat bahwa sukses pembangunan ekonomi tidak identik dengan liberalisasi perdagangan. Kita lihat pengalaman Cina, India dan Korea Selatan yang tidak mengikuti resep Konsensus Washington pada tahap awal pertumbuhan mereka. Tidak ada *trade-off* antara perbaikan hak asasi manusia dan perbaikan keadaan penduduk miskin. Kini orang tidak percaya lagi dengan Konsensus Washington. Setiap bangsa punya cara sendiri untuk melakukan bisnisnya sendiri. Buat memajukan pembangunan sebuah bangsa diperlukan pemimpin politik yang memiliki rasa percaya diri dan komitmen politik bahwa dia akan membangun bangsanya dengan visinya sendiri, bukan dengan resep generik yang dijajakan secara global. Persoalannya sekarang seberapa jauh kita mampu menarik masa depan bangsa kita ke tangan kita sendiri. Setiap bangsa mengambil pendekatan yang berbeda tergantung pada karakter kepemimpinannya, komitmennya, dan kapasitasnya. Sangat enak bila kita hidup di negara di mana pemimpinnya benar benar memiliki

akuntabilitas yang hanya tertarik pada pertumbuhan ekonomi bangsanya. Sayang hal ini jarang bersua dalam realitas (Rodrik, 2006).

Stabilitas ekonomi nasional terletak pada kemampuan mewujudkan integrasi ekonomi nasional yang menghendaki demokrasi politik berperan sebagai instrumen demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menghasilkan stabilitas mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah kondisi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tidak akan ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan sepanjang pemerataan dapat ditempatkan sebagai sumber pertumbuhan. Mohammad Hatta sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah menyatakan urgensi keadilan sebagai sumber kemakmuran (Hatta, 1946, Hatta, 1976). Pemegang Nobel ekonomi, Gunnar Myrdal juga telah jauh hari menyatakan bahwa pemerataan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Myrdal, 1974). Banyak hasil penelitian empiris memberi pembenaran terhadap pandangan yang menyatakan bahwa redistribusi aset dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Persson and Tabellini, 1994).

Kesenjangan di dalam distribusi pendapatan adalah cerminan dari ketimpangan di dalam distribusi aset produktif. Pemilikan aset produktif menghasilkan pendapatan. Semakin banyak seseorang menguasai aset produktif, semakin besar klaimnya terhadap pendapatan (Wie, 1981). Buat menjembatani antara dua kesenjangan tersebut diperlukan kebijakan negara (Djojohadikusumo, 1975). Sementara kebijakan sangat tergantung pula pada konstelasi politik dan kendala kelembagaan. Di antara persoalan kesenjangan dalam distribusi aset yang paling penting bagi negara agraris adalah pemilikan dan penguasaan tanah. Terdapat kecenderungan bagi distribusi tanah semakin timpang dan lebih timpang dibanding distribusi pendapatan.

Keterbatasan tanah dan selanjutnya modal buat mengolah tanah menjadi penyebab kemiskinan di sektor pertanian dan di daerah perdesaan pada umumnya. Persoalan ini memiliki dimensi yang luas karena konsentrasi penguasaan tanah berhubungan positif dengan konsentrasi pendapatan. Di negara berkembang, konsentrasi penguasaan tanah menyebabkan konsentrasi pendapatan, mencerminkan masih pentingnya peran sektor pertanian (Quan and Koo, 1985).

Kebijakan makroekonomi yang menghasilkan stabilitas harga, pendalaman sektor keuangan, dan stabilitas fiskal ditemukan memberikan dampak positif terhadap pemerataan dalam distribusi pendapatan (Bulir, 2001). Kenaikan harga hanya memberikan pengaruh negatif apabila terjadi hiperinflasi. Inflasi yang sedang memiliki hubungan yang tidak linier dengan distribusi pendapatan. Namun inflasi yang rendah cenderung memberikan dampak pendalaman bagi pasar sektor keuangan di mana setiap orang memiliki akses lebih baik terhadap kredit. Sementara dampak variabel fiskal terbukti kecil sebagai akibat berperannya dampak kebijakan moneter. Perbaikan distribusi pendapatan yang besar dapat dicapai melalui kebijakan inflasi rendah pada setiap tahap pembangunan ekonomi.

Konsentrasi pasar bersumber dari konsentrasi pemilikan aset produktif yang selanjutnya menentukan corak distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini sangat penting di sektor pertanian yang masih menjadi gantungan penghidupan mayoritas rakyat Indonesia. Lahan pertanian masih saja menjadi faktor produksi utama yang mempengaruhi produktifitas pertanian, kesempatan kerja, pendapatan petani, kemiskinan, dan pasar domestik buat mendukung industrialisasi.

Persoalan distribusi tanah di sektor pertanian kondisinya masih saja tidak menguntungkan bagi perbaikan produktifitas (Karimi, 1986).

Selama tiga dasawarsa terakhir telah berlangsung peningkatan konsentrasi pemilikan tanah (Satria et al., 2008). Rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 ha meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta. Sementara penguasaan lahan rata-rata telah mengalami penurunan dari 0.27 ha pada tahun 1983 menjadi 0,09 ha pada tahun 2003.

Ketimpangan distribusi tanah yang dihadapi Indonesia sejak tiga dasawarsa sangat mencemaskan. Kenyataan ini didukung oleh angka Gini rasio distribusi tanah dari empat Sensus Pertanian sejak tahun 1973 hingga 2003 yang mengalami peningkatan. Angka Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Makin dekat angka Gini ke angka 1 berarti ketimpangan makin tinggi. Sebaliknya makin dekat Gini ke 0, makin rendah tingkat ketimpangan. Tabel 4 memperlihatkan angka Gini rasio penguasaan tanah pertanian di Indonesia. Gini rasio meningkat tajam dari 0,55 pada tahun 1973 menjadi 0,72 pada tahun 2003.

Tabel 4. Konsentrasi Penguasaan Lahan			
Gini Rasio			
Periode	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1973	0.45	-	0.55
1983	0.50	0.48	0.50
1993	0.56	0.48	0.64
2003	0.72	0.58	0.72
Pertumbuhan, 1993-2003 (%)			
Petani Pemilik	1.47	2.06	1.73
Petani Gurem	2.16	3.05	2.39
Sumber: BPS			

Selama 1999-2010 garis kemiskinan meningkat rata-rata sebesar 7,89% di perdesaan dan 8,56% di perkotaan. Sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 1,91% rata-rata dan di perdesaan turun sebesar rata-rata 3,5% per tahun selama 1999-2010. Keseluruhan Indonesia jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,5%. Selama periode ini kita memiliki statistik yang lengkap untuk tingkat kemiskinan setiap tahunnya. Pada saat bersamaan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka rata-rata % per tahun.

Persoalan konsentrasi ekonomi tidak hanya terbukti dari Sensus Pertanian 1973-2003, tetapi juga dari Sensus Ekonomi 2006. Tabel 5 memperlihatkan keadaan perusahaan, pekerja dan omset menurut kategori usaha. Lebih dari 83% usaha di Indonesia masuk dalam kategori mikro. Perusahaan mikro menyediakan hampir 63% pekerjaan, tetapi menguasai omset kurang dari 4%. Sebaliknya sebanyak 0,18% perusahaan masuk dalam kategori besar menyediakan pekerjaan kurang dari 10%, tetapi menguasai omset hampir 76%. Angka ini memperlihatkan betapa tingginya kesenjangan ekonomi kita. Kesenjangan ekonomi mencerminkan tingginya kekuatan

pasar yang selanjutnya mampu menghasilkan kekuatan politik. Persoalan ini akan mempengaruhi stabilitas dan potensi krisis. Demokrasi ekonomi tampaknya merupakan tuntutan kondisi objektif perekonomian kita.

Tabel 5. Konsentrasi Usaha Menurut Sensus Ekonomi 2006 (%).

Kategori Usaha	Perusahaan	Pekerja	Omset
Besar	0,19	9,64	75,58
Menengah	0,67	5,91	2,09
Kecil	15,82	21,57	18,37
Mikro	83,32	62,88	3,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Sistem ekonomi pasar yang dipakai di negara negara maju adalah sebuah sistem yang sudah mapan dengan dukungan kelembagaan yang membuatnya efektif bekerja (Budiono, 2001). Kelembagaan sosial, politik, hukum dan ekonomi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pasar. Sistem pasar tidak bisa bekerja tanpa mendapatkan dukungan kelembagaan yang memungkinkannya bekerja. Jadi sistem pasar tidak semata bekerjanya mekanisme pasar, tetapi bekerjanya sebuah sistem yang mengandalkan pasar buat mengalokasi sumberdaya langka secara efisien. Efisiensi adalah cermin bekerjanya sistem pasar.

Sistem pasar dipakai oleh kapitalisme untuk menyelesaikan persoalan alokasi sumberdaya dan distribusi pendapatan. Sementara sosialisme menyelesaikannya dengan menggunakan peran negara (Shionoya, 2005). Globalisasi merubah struktur kekuasaan domestik dan membentuk hubungan sosial baru dengan memanfaatkan sistem pasar bebas. Dampaknya menciptakan polarisasi kaya miskin yang mengandung potensi konflik sosial. Selanjutnya menciptakan instabilitas, lalu krisis. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan ekonomi yang selama ini mengalami erosi memerlukan perbaikan distribusi untuk mendukung keadilan sosial dan pemerataan hak ekonomi. Tindakan kolektif yang kreatif dan kepedulian terhadap keadilan sosial dapat membendung dampak negatif sistem pasar (Cohen, 2008). Globalisasi tidak hanya berarti integrasi pasar domestik ke pasar dunia, tetapi juga membawa jiwa politik liberal yang didukung oleh sistem produksi dan pasar kerja yang mencerminkan kekuatan pasar. Pada saat yang sama, kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat lokal akan mengalami disintegrasi (Bakker and Gill, 2003).

Dasar pemerintahan demokrasi adalah distribusi hak politik yang sama antar warga. Perbedaan antara ekonomi dan politik tercermin dalam perbedaan cita-cita kapitalisme dan demokrasi. Pertama, sistem pasar menjamin kebebasan dari pemerintah, sementara sistem pasar menjamin kebebasan di dalam pemerintahan. Kedua, sistem pasar tidak menjamin kesamaan hak ekonomi atas penguasaan sumberdaya, sedangkan sistem pemungutan suara dalam demokrasi menjamin satu

orang satu suara. Ketiga, dalam sistem pasar kekuatan uang berdaulat membuat keputusan alokasi sumberdaya ekonomi, tetapi dalam sistem demokrasi kekuatan suara menentukan alokasi kekuasaan atas dasar manifesto para politisi dan partai politik (Shionoya, 2005).

Pasar bebas tidak menghasilkan efisiensi ekonomi selama informasi tidak sempurna. Informasi selalu tidak sempurna dan pasar selalu tidak seimbang. Pasar juga tidak menghasilkan efisiensi ekonomi ketika sebuah negara perlu menyerap teknologi baru dan menutup celah pengetahuan yang menjadi kunci pembangunan. Kini semakin banyak ekonom akademisi percaya bahwa pasar sendirian tidak mampu menghasilkan efisiensi ekonomi (Stiglitz, 2006).

Ekonomi pasar yang sehat tergantung kepada kesadaran pelaku pasar (Korten, 1999). Pasar harus berfungsi dengan kesadaran yang jelas agar dapat memberikan kontribusi buat bekerjanya sebuah sistem yang efisien. Kita mau sistem pasar yang bersahabat dengan rakyat.

Sistem pasar yang mengandalkan operasinya dengan pelaku yang mementingkan diri sendiri tidak berakhir dengan kehidupan yang harmonis. Karena kehidupan yang harmonis memerlukan kerelaan berkorban bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi terutama bagi kepentingan masyarakat. Pengorbanan adalah kunci bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu diperlukan sebuah kekuatan yang memberikan semangat berkorban untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Di sini terletak peran kekuatan spiritual (Chapra, 2000).

Pemerintah banyak berperan dalam mengatasi kegagalan pasar dan dalam menjamin keadilan sosial (Stiglitz, 2002). Pasar sebagai sebuah instrumen yang kuat buat melakukan kebaikan belum berjalan sesuai dengan potensinya. Akibatnya sistem pasar membuat banyak orang terpinggirkan dan sengsara (Stiglitz, 2003).

Kapitalisme adalah kekuatan yang bergerak tanpa arah. Sebagai buatan manusia, kapitalisme memerlukan intervensi pemerintah agar ia dapat melayani keperluan manusia. Tanpa kehadiran pemerintah, kapitalisme tidak mampu mengatasi sendiri rintangan yang dihadapinya untuk berfungsi secara tepat. Kapitalisme telah memperlihatkan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan dan kekayaan, kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Adalah tugas masyarakat buat melahirkan definisi sasaran apa saja yang harus dicapai dan kelembagaan apa yang diperlukan agar agar sasaran itu tercapai (Cornwall and Cornwall, 2001).

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Keadilan sosial adalah hasil dari kerja produktif dan kesempatan yang sama sehingga setiap orang dapat menggunakan seluruh kemampuannya untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dari hasil usahanya. Dalam Islam keadilan dan persamaan berarti setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama, tidaklah berarti persamaan di dalam kekayaan atau kemiskinan (Chapra, 1985). Negara berperan menjamin bahwa setiap warga memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Qur'an 2:275-9). Intervensi pemerintah dibenarkan untuk mengurangi kesenjangan. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak merusak jalannya mekanisme pasar dalam menentukan harga, tetapi berperan menjamin informasi yang lebih sempurna buat terjadinya kebebasan ekonomi yang tidak merugikan pelaku pasar, baik pembeli maupun penjual. Bunga uang tidak sejalan dengan keadilan sosial. Solusinya adalah

perekonomian atas dasar kerjasama di mana pelaku ekonomi dapat berbagi hasil dan resiko dengan kesepakatan. Sistem ini akan berakhir dengan stabilitas ekonomi makro tidak hanya full-employment, tetapi over-employment (Weitzman, 1984, Presley and Sessions, 1994).

Perekonomian global menghadapi pengalaman hampir mati yang memaksa kami ulang terhadap prioritas dan nilai-nilai yang dianut selama ini. Krisis yang terjadi tidak hanya memperlihatkan kesalahan model ekonomi, tetapi juga kesalahan di dalam kehidupan masyarakat. Terlalu banyak orang mengambil manfaat dari kelemahan orang lain. Kepercayaan menjadi rusak. Setiap hari lahir cerita tentang perandai buruk orang-orang sektor keuangan. Kiranya kita perlu bertanya apakah sistem ekonomi yang sedang kita jalankan akan memenuhi aspirasi kita. Masyarakat yang telah kita bangun selama ini terlalu mementingkan materialisme di atas komitmen moral. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa menghitung keberlanjutan lingkungan sosial. Kita tidak bisa bertindak sebagai sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kita bersama karena individualisme dan fundamentalisme pasar telah menghancurkan setiap rasa bermasyarakat. Upaya mengejar keuntungan dan mengangkat kepentingan diri sendiri mungkin tidak menciptakan kesejahteraan yang menjadi harapan, tetapi bahkan menciptakan defisit moral (Stiglitz, 2010). Keadilan sosial memerlukan keseimbangan peran pemerintah pada tingkat global maupun lokal.

Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari integrasi sosial dan usaha sosial (social enterprises). Kehadiran usaha sosial bertujuan membantu pekerja yang terpinggirkan dari pasar kerja, bukan memaksimalkan keuntungan untuk tujuan akumulasi modal. Motivasi kehadiran usaha sosial adalah untuk memerangi pengangguran jangka panjang dengan berbuat pada tingkat lokal untuk kepentingan bersama. Dengan cara ini, integrasi sosial, keadilan sosial, ikatan dan pendidikan sosial menjadi kepedulian bersama (Borzaga and Defourny, 2003).

Ada tiga perbedaan antara usaha swasta dan usaha sosial. Satu, keuntungan bukanlah tujuan utama dari penanaman modal. Kedua, pengguna bukanlah konsumen, tetapi pemangku kepentingan. Ketiga, demi kepedulian terhadap keadilan sosial, pelayanan bukan atas dasar kemampuan membayar (Borzaga and Defourny, 2003).

Usaha sosial seperti tetap memerlukan aturan pemerintah, karena mereka tidak hanya memberikan manfaat melalui sistem pasar, tetapi juga manfaat kolektif yang berpengaruh terhadap pemerataan dan keadilan sosial (Borzaga and Defourny, 2003). Perusahaan mengikuti model pengelolaan demokratis. Pada umumnya memiliki struktur organisasi horizontal dengan dasar kepercayaan antar anggota sehingga memungkinkan demokrasi ekonomi dijalankan. Keputusan bisnis diambil sesuai dengan tujuan untuk menyediakan kesempatan bekerja bagi anggotanya (Borzaga and Defourny, 2003).

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Ketika orang bicara demokrasi, kita ingat bahwa setiap orang punya hak politik yang sama. Dia berhak memilih dan dipilih. Suara mayoritas menjadi pemenang di dalam setiap pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Apakah demokrasi politik adalah wujud dari kedaulatan rakyat di mana setiap orang benar

benar mampu menunaikan hak pilihnya secara bebas? Bisa ya dan bisa tidak! Ada kemungkinan satu kelompok menjual hak pilihnya kepada kelompok lain yang memerlukan. Siapa yang rela menjual dan siapa mampu membeli? Disini persamaan hak ekonomi berbicara.

Bila kesenjangan ekonomi tinggi, akan terdapat dua kelompok di dalam masyarakat. Satu kelompok di mana terlalu banyak orang yang tidak punya apa-apa. Di kelompok yang lain terlalu sedikit orang yang memiliki segala-galanya. Setiap orang pada setiap kelompok memiliki hak politik yang sama, tetapi memiliki hak ekonomi yang tidak sama. Akibatnya nilai ekonomi setiap hak pilih akan berbeda pada setiap orang. Harga relatif hak pilih akan berbeda antar pemilik hak pilih. Perbedaan harga relatif hak pilih membuka peluang keuntungan perdagangan suara. Kelompok yang memiliki segala-galanya akan untung menjual suara, sedangkan kelompok yang tidak punya apa-apa akan untung dengan jual suara. Kedua kelompok sama sama untung. Tetapi makna demokrasi politik jadi hilang bagi banyak orang yang tidak punya kekuatan ekonomi. Kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan ekonomi. Pemilik suara banyak dengan sedikit aset akan menjual hak pilihnya kepada sekelompok pemilik suara yang memiliki sejumlah besar aset ekonomi. Kondisi ini mempertahankan konsentrasi ekonomi pada sejumlah elit yang menguasai modal. Redistribusi aset produktif sangat diperlukan untuk menyelamatkan hak demokrasi setiap orang. Demokrasi ekonomi menjadi kebutuhan demokrasi politik. Keduanya harus seimbang untuk bertahan. Kesenjangan ekonomi adalah musuh besar demokrasi.

Tumbuhnya demokrasi politik tidak bisa lepas dari kondisi ekonomi (Kelso and Adler, 1958). Demokrasi membutuhkan sebuah sistem ekonomi yang mendukung kebebasan dan persamaan politik bagi semua orang. Orang tidak dapat menikmati kebebasan politik ketika ia menderita dalam kehidupan ekonomi.

Demokrasi ekonomi adalah pilar kehidupan demokratis yang setara dengan demokrasi politik. Agar struktur ekonomi mendukung kebebasan politik diperlukan: (1) kebebasan ekonomi; dan (2) persamaan hak ekonomi. Seseorang memiliki kebebasan ekonomi bila memiliki harta yang mencukupi untuk mencapai kehidupan minimum yang layak sebagai manusia merdeka tanpa tergantung kepada orang lain yang menyebabkan kedaulatannya hilang (Kelso and Adler, 1958, Dahl, 1985, Thurow, 1996). Sementara persamaan hak ekonomi bukan berarti persamaan kepemilikan harta seperti halnya persamaan fungsi di dalam persamaan politik. Bila dalam politik demokrasi ada pergantian pemimpin, dalam sebuah demokrasi ekonomi kiranya terjadi pula perputaran aristokrasi ekonomi (Kelso and Adler, 1958).

Dalam situasi di mana kita menghadapi sistem pasar bebas secara global dan persoalan kemiskinan pada tingkat lokal, demokrasi ekonomi adalah sebuah pilihan yang perlu mendapat dukungan publik karena sejalan dengan konstitusi. Demokrasi ekonomi semakin urgen di tengah kemajuan teknologi informasi dan teknologi buat menjamin mayoritas rakyat terlindung dari persaingan pasar. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keunggulan kompetitif pelaku ekonomi kuat akan makin dominan menyingkirkan pelaku ekonomi mayoritas rakyat yang lemah. Karena itu kita memerlukan sebuah manifesto demokrasi ekonomi. Persamaan hak politik dalam sistem demokrasi membutuhkan persamaan hak ekonomi agar kedaulatan rakyat tetap berwujud kedaulatan rakyat, bukan kekuatan uang penguasa sistem pasar. Pemerintah perlu mewaspadaai agar kekuatan ekonomi tidak menguasai kekuatan politik dan akhirnya menghancurkan demokrasi politik (Marciano and Josselin, 2007).

Bapak Rektor, majelis Senat Guru Besar, dan hadirin yang berbahagia!

Pembangunan ekonomi memerlukan penerapan prinsip keadilan dan demokrasi di dalam kehidupan pasar. Bila kekuatan demokrasi tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar, maka kekuatan pasar akan menggantikan kedaulatan rakyat. Demokrasi akan menjadi instrumen pasar. Sementara dalam kehidupan demokratis pasarlah yang mesti berperan sebagai instrumen demokrasi.

Distribusi kekuatan pasar mencerminkan distribusi penguasaan aset. Mekanisme pasar yang berkeadilan, demokratis, dan bersahabat dengan rakyat adalah kondisi yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi yang demokratis. Secara faktual, kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan menurunnya konsentrasi kekuatan pasar, menurunnya ketimpangan distribusi penguasaan aset, dan menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiganya harus menjadi komponen utama penyusunan kebijakan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagai wujud dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Keadilan harus menjadi kunci kemakmuran yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat maju. Konsekuensi kebijakan pembangunan ekonomi di masa lalu yang mendahulukan kemakmuran adalah kesenjangan, ketergantungan, instabilitas, dan krisis. Pembangunan ekonomi nasional Indonesia ke depan haruslah menjadikan keadilan distributif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan harus mengalami perubahan dari *growth with equity* menjadi *equity for growth*. Pembangunan dengan keadilan ekonomi lahir dengan kemampuan mengintegrasikan kekuatan ekonomi bangsa secara nasional, bukan pemerintah pusat mengatasnamakan nasional seperti terjadi hingga kini. Karena itu redistribusi aset produktif dan integrasi ekonomi nasional harus menjadi komponen utama di dalam sistem ekonomi nasional.

Indonesia yang maju haruslah Indonesia yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa sejak 65 tahun yang lalu. Indonesia belum maju kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat belum tercermin di dalam kehidupan rakyat. Upaya mewujudkan keadilan sosial adalah tugas utama pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Secara ekonomi keadilan sosial itu dapat diukur dengan distribusi aset yang makin merata, distribusi pendapatan yang makin merata, kesenjangan ekonomi yang makin kecil, kesempatan kerja yang makin mudah, sumber pertumbuhan yang makin merata, pelaku ekonomi rakyat yang makin kuat, ketergantungan kepada kekuatan asing yang makin rendah dan daya saing yang makin tinggi dengan perdagangan yang makin bebas.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemerataan kekuatan pasar, Indonesia menghadapi globalisasi sebagai kendala eksternal dan otonomi daerah sebagai kendala internal. Kondisi ini memperlihatkan urgennya kebijakan publik yang membuat mekanisme pasar berpihak kepada implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi. Pemihakan pasar terhadap mayoritas pelaku ekonomi rakyat perlu diikuti oleh reformasi kelembagaan yang mampu menghasilkan persamaan akses terhadap pemilikan aset produktif dan partisipasi mayoritas pelaku ekonomi rakyat di dalam ekonomi pasar domestik.

Bila terdapat nilai-nilai kebenaran dari pidato ini, semuanya adalah milik Allah SWT. Bila semuanya hanyalah kekeliruan dan kesalahan, semuanya milik saya. Untuk semua kekeliruan dan kesalahan itu, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memaafkan segala keterbatasan saya.

Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Selanjutnya kepada bapak Rektor selaku Ketua Senat dan seluruh anggota Senat yang telah memberi kesempatan kepada saya menjadi bagian dari komunitas, dan mendukung terlaksananya acara pengukuhan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pengukuhan saya. Semoga Allah SWT menerima semua kebaikan bapak dan ibu sebagai amal saleh.

Sangat banyak orang berjasa mengantarkan saya menjadi Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Utang budi paling besar yang tidak pernah saya sanggup melunasinya adalah kepada kedua orang tua saya. Ayahanda Karimi (alm) bekerja keras dengan komitmen tinggi untuk membiayai pendidikan saya, mulai dari sekolah rakyat sampai tamat Fakultas Ekonomi Unand. Beliau tidak tamat sekolah dasar, tapi suka membaca. Beliau yang mengajarkan saya ke toko buku dan membeli buku. Hingga kini membeli buku menjadi bagian dari kehidupan saya. Kepada ibunda Yuniana yang melahirkan saya hari ini Sabtu 9 Oktober 56 tahun yang lalu di kampung saya Tanjungjati. Ibunda selalu memberikan approval apapun yang saya minta kepada ayah sepanjang urusan sekolah. Uang selalu ada untuk sekolah. Bila tidak cukup, koperasi selalu siap untuk meminjam, termasuk untuk beli buku dan sewa rumah di Padang. Ayah dan ibunda mencicil utang koperasi setiap hari Jumat. Kita tidak mengenal kemiskinan, tapi usaha dan kepercayaan. Setahu saya, ayah dan ibu tidak punya modal. Tapi pasar menyediakan semua kebutuhan usaha roti yang digeluti ayah dan ibu sejak masa muda. Tanggungjawab saya sejak sekolah dasar hingga tamat SMEA adalah ikut jualan, dari pekan ke pekan. Sekolah adalah pendukung usaha. Itulah pertimbangan ayah kenapa saya mesti ekonomi di SMEP Limbanang. Kalau perlu saya cabut sekolah, minimum 2 kali seminggu. Senin jualan di Suliki dan Kamis jualan di Limbanang. Semua itu dengan kesenangan. Bagi ayah saya, masuk kelas tidak begitu perlu. Yang perlu belajar dengan buku. Tidak ada istilah tidak cukup buku. Di pasar, roti ditukar dengan buku. Mudah dengan sistem pasar. Yang penting kepercayaan. Banyak kisah saya dengan ayah. Semua berkaitan usaha ekonomi rakyat yang mandiri. Tidak ada bantuan pemerintah. Saya mendoakan semoga amal ibadah ayahanda Karimi diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT menempatkan ayah saya bersama hamba-hambanya yang sholeh. Alhamdulillah, ibunda hadir dalam acara ini. Sesungguhnya yang mempertanyakan mengapa saya masih belum Guru Besar adalah ibunda. Acara hari ini bagi saya juga merupakan ucapan terima kasih kepada ibunda yang pertama kali mengajari saya membaca, menulis dan berhitung sebelum saya menjadi anak sekolah.

Kepada isteri saya dr. Susila Sastri, M.Biomed, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, segala-galanya dan banyak sekali. Saya pertama kali mengenal isteri saya di ruang ini sejak 32 tahun yang lalu. Cinta pertama, langsung jadi. Terima kasih untuk Cas yang telah melahirkan 3 anak saya: Fikri, Furqan, dan Fadila (alm). Saya berhutang kesabaran, kepatuhan, kemandirian, ketangguhan, kerjasama dan

komitmen pada isteri saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita.

Referensi

- BAKKER, I. & GILL, S. (Eds.) (2003) *Power, Production and Social Reproduction*, New York, Palgrave Macmillan.
- BAPPENAS (2010) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2010-2014*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas.
- BORZAGA, C. & DEFOURNY, J. (2003) *The Emergence of Social Enterprise*, London, Routledge.
- BUDIONO (2001) *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, Yogyakarta, BPFE.
- BULIR, A. (2001) The Impact of Macroeconomic Policies on the Distribution of Income. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 72, 253-270.
- CHAPRA, M. U. (1985) *Toward a Just Monetary System*, Leicester, Islamic Foundation.
- CHAPRA, M. U. (2000) Is it necessary to have Islamic economics? *Journal of Socio-Economics*, 29, 21-37.
- COHEN, B. J. (2008) *International Political Economy*, Princeton, Princeton University Press
- DAHL, R. A. (1985) *A Preface to Economic Democracy*, Berkeley, University of California Press.
- DJOJHADIKUSUMO, S. (1975) *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Depan*, Jakarta, LP3ES.
- HATTA, M. (1946) *Ekonomi Indonesia di Masa Datang. Konperensi Ekonomi* Yogyakarta.
- HATTA, M. (1976) Bagi Kue Dulu, Biar pun Kecil! *Prisma*, 42-45.
- KARIMI, S. (1986) Land Concentration and Rural Income Inequality. *Journal of Asian and Pacific Studies*, 137-148.
- KELSO, L. O. & ADLER, M. J. (1958) *The Capitalist Manifesto*, New York, RANDOM HOUSE.
- KORTEN, D. C. (1999) *The Post-Corporate World: Life After Capitalism*, San Fransisco, Kumarian Press.
- LEVINE, R. (1997) Financial Development and Economic Growth. *Journal of Economic Literature*, 35, 688-726.
- MARCIANO, A. & JOSSELIN, J.-M. (2007) *Democracy, Freedom and Coercion: A Law and Economics Approach*, Cheltenham, UK, Edward Elgar.
- MINSKY, H. (1986) *Stabilizing an Unstable Economy*, New York, McGraw-Hill.
- MYRDAL, G. (1974) Growth and Social Justice. *World Development*, 119-120.
- PERSSON, T. & TABELLINI, G. (1994) Is Inequality Harmful for Growth? *American Economic Review*, 600-621.
- PRESLEY, J. R. & SESSIONS, J. G. (1994) Islamic Economics: The Emergence of A New Paradigm. *The Economic Journal*, 104, 584-596.
- QUAN, N. T. & KOO, A. Y. C. (1985) Concentration of Land Holdings: An Empirical Exploration of Kuznets' Conjecture. *Journal of Development Economics*, 18, 101-117.
- RODRIK, D. (2006) Home-Grown Growth. *Harvard International Review*, 27, 74-8.
- SATRIA, A., DAMANHURI, D., SUNITO, S., SYAH, D., TAMBUNAN, A., ADIWIBOWO, S. & KOLOPAKING, L. M. (2008) *Perspektif Baru Pembangunan untuk Menanggulangi Krisis Pangan dan Energi*, Bogor, Institut Pertanian Bogor.

- SEERS, D. (1977) The New Meaning of Development. *International Development Review*, 19.
- SHIONOYA, Y. (2005) *Economy and Morality: The Philosophy of the Welfare State*, Northampton, MA, Edward Elgar.
- STIGLER, G. (1952) The Goals of Economic Policy. *The Journal of Business*, 31, 169-176.
- STIGLITZ, J. E. (2002) *Globalization and its Discontents*, New York, W.W. Norton & Company Inc.
- STIGLITZ, J. E. (2003) *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade*, New York, W.W. Norton and Company Inc.
- STIGLITZ, J. E. (2006) *Making Globalization Work*, New York, NY, W.W. Norton.
- STIGLITZ, J. E. (2010) *Freefall: America , Free Markets, and the Sinking of the World Economy*, New York, Norton.
- THUROW, L. (1996) *The Future of Capitalism: How Today's Economic Forces Will Shape Tomorrow's World*, London, Nicholas Brealey Publishing.
- WEITZMAN, M. (1984) *The Share Economy*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
- WIE, T. K. (1981) *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*, Jakarta, Sinar Harapan.